

OPINI PUBLIK DALAM SISTEM DEMOKRASI

Serliana *¹

Haura Putri Aqillah ²

Desi Ratna Sari Lumban Gaol ³

Mhd Rafi Zhafran ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*e-mail: anaserliana03@gmail.com¹, hauraaqillah4@gmail.com², desilumbangaol29@gmail.com³, mhdrafizhafran1403@gmail.com⁴

Abstrak

Opini publik merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai cerminan pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menganalisis hubungan antara pemilu dan opini publik, serta pengaruh polling terhadap pembentukan opini dan legitimasi politik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pemilu menjadi wahana bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi mereka, sementara opini publik berperan sebagai kontrol sosial yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hasil polling tidak hanya mengukur dukungan terhadap kandidat, tetapi juga membentuk perilaku pemilih. Selain itu, opini publik yang kuat dapat meningkatkan legitimasi pemerintah, sedangkan pengabaian terhadap suara rakyat berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Kata Kunci: Politik, Opini Publik, Sistem Demokrasi.

Abstract

Public opinion is a crucial element in a democratic system, serving as a reflection of the public's views on political issues and government policies. This study analyzes the relationship between elections and public opinion, as well as the influence of polling on opinion formation and political legitimacy. Using qualitative research methods, this study finds that elections are a vehicle for the public to express their aspirations, while public opinion acts as a social control that influences government policies. Polling results not only measure support for candidates but also shape voter behavior. In addition, strong public opinion can increase government legitimacy, while ignoring the voice of the people has the potential to cause political instability. This study concludes that active public involvement in the political process is essential to creating an accountable and responsive government.

Keywords: *Politic, Public Opinion, Democratic System.*

PENDAHULUAN

Opini publik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai cerminan dari pandangan, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks demokrasi, di mana kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama, opini publik tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang mengawasi tindakan pemerintah. (Dayan, 2024).

Opini publik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan pandangan atau pendapat yang dimiliki oleh sekelompok orang mengenai suatu isu tertentu. Menurut beberapa ahli, opini publik terbentuk melalui proses interaksi sosial yang melibatkan komunikasi, diskusi, dan penyebaran informasi di antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, media massa dan platform digital memainkan peran krusial dalam membentuk dan menyebarkan opini publik. Melalui media, masyarakat dapat mengungkapkan pendapat mereka, baik secara positif maupun negatif terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam tatanan demokrasi, opini publik hadir sebagai nadi yang menggerakkan roda pemerintahan. Sebagai manifestasi dari kehendak rakyat, opini publik berperan sentral dalam membentuk kebijakan publik, menentukan arah pembangunan, dan bahkan mengubah lanskap politik suatu negara. Konsep ini mengakar pada prinsip dasar demokrasi, yakni kedaulatan rakyat,

di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, dinamika opini publik seringkali kompleks dan penuh tantangan.

Dalam konteks politik, opini publik menjadi komoditas yang sangat berharga. Partai politik, kelompok kepentingan, dan individu berusaha memengaruhi opini publik untuk mencapai tujuan politik mereka. Strategi komunikasi politik yang canggih, survei opini publik, dan kampanye media menjadi alat yang efektif untuk membentuk persepsi publik. Namun, manipulasi opini publik juga seringkali terjadi, sehingga diperlukan literasi digital yang tinggi bagi masyarakat untuk dapat menyaring informasi dan membentuk opini yang kritis. (Faizaliskandiar, 1994).

Peran opini publik dalam demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum. Opini publik juga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, pengawasan kinerja pemerintah, dan bahkan pergantian rezim. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi disonansi antara opini publik dengan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kepentingan kelompok tertentu, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya kapasitas pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat.

Meskipun opini publik memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah manipulasi informasi yang dapat mengubah persepsi masyarakat secara tidak adil. Di era digital saat ini, penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial sering kali disertai dengan hoaks atau berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. (Suhaeri dan Krisna, 2023).

Selain itu, polarisasi politik juga menjadi masalah serius dalam pembentukan opini publik. Ketika masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan ekstrem, dialog konstruktif menjadi sulit dilakukan. Hal ini dapat menghambat terciptanya kesepakatan bersama mengenai isu-isu penting dalam pemerintahan. (Samuel, 1990).

Opini publik adalah pilar utama dalam sistem demokrasi yang memastikan bahwa pemerintah tetap akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Melalui partisipasi aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan, masyarakat dapat mempengaruhi arah kebijakan dan memastikan bahwa pemerintahan bekerja untuk kepentingan umum. Untuk memperkuat peran opini publik, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan transparansi, edukasi politik, dan literasi digital di kalangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah, yakni: Bagaimana hubungan antara pemilu dan opini publik?, Bagaimana pengaruh poling terhadap opini publik dan keputusan politik?, Bagaimana opini publik memengaruhi legitimasi politik suatu pemerintahan?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka terdapat tujuan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pemilu mencerminkan dan memengaruhi opini publik, serta bagaimana hasil pemilu dapat menggambarkan preferensi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu politik dan kandidat.
2. Mengeksplorasi bagaimana hasil poling dapat membentuk opini publik dan memengaruhi keputusan politik, baik oleh pemilih maupun oleh para pembuat kebijakan, serta memahami peran poling dalam strategi kampanye politik.
3. Menganalisis bagaimana opini publik berkontribusi pada legitimasi politik suatu pemerintahan, termasuk faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dampaknya terhadap stabilitas politik.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan metode pengumpulan data sehingga ditemukan informasi yang relevan. Demi mempertajam penelitian, analisa data yang digunakan menggunakan metode analisa deskriptif dan melakukan kajian pustaka (*library research*) dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, serta sumber lain yang terkait dengan persoalan pokok penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Pemilu Dan Politik

Pemilu, atau singkatan dari Pemilihan Umum, adalah proses demokratis yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintahan secara langsung. Proses ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk menentukan para pemimpin yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Pemilu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan representatif, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan suara dan aspirasi mereka melalui pemungutan suara. (Larassetya, dkk, 2024).

Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pemilu, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil dari pemilu ini kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik di berbagai tingkat pemerintahan, baik lokal maupun nasional.

Sementara itu, opini publik adalah sekumpulan pandangan atau pendapat yang dimiliki oleh sekelompok orang mengenai isu tertentu. Opini publik terbentuk melalui proses interaksi sosial dan komunikasi di antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam konteks demokrasi, opini publik berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah tetap akuntabel terhadap rakyat. Opini publik dapat mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan pemerintah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan opini publik memiliki hubungan yang erat dalam konteks demokrasi. Pemilu adalah proses di mana warga negara memberikan suara untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan pemerintah. Sementara itu, opini publik mencerminkan pandangan, sikap, dan harapan masyarakat terhadap isu-isu politik, termasuk pemilu itu sendiri. Dalam tulisan ini, kita akan membahas bagaimana kedua konsep ini saling mempengaruhi dan berinteraksi, serta dampaknya terhadap proses demokrasi. (Larassetya, dkk, 2024).

Pemilu merupakan salah satu cara utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan opini mereka. Melalui pemungutan suara, individu dapat memilih kandidat atau partai politik yang mereka anggap paling sesuai dengan visi dan misi mereka. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kandidat, tetapi juga sebagai refleksi dari opini publik yang ada di masyarakat.

Sebelum pemilu berlangsung, terjadi proses pembentukan opini publik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti media massa, diskusi di masyarakat, dan kampanye politik. Media sosial telah menjadi platform penting dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi politik yang efektif dapat membentuk opini publik yang mendukung kandidat tertentu atau kebijakan yang diusulkan. (Marijan, 2010).

Opini publik tidak hanya berfungsi sebagai cerminan pandangan masyarakat tetapi juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil pemilu. Ketika mayoritas masyarakat memiliki opini yang kuat terhadap suatu isu atau kandidat, hal ini dapat berujung pada mobilisasi pemilih yang lebih besar. Misalnya, jika ada isu penting seperti korupsi atau ketidakadilan sosial yang mendapat perhatian luas, kandidat yang mampu mengangkat isu tersebut dalam kampanye mereka akan lebih mungkin mendapatkan dukungan.

Hasil polling sebelum pemilu sering kali digunakan untuk mengukur opini publik dan dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Jika sebuah kandidat terlihat unggul dalam polling, hal ini dapat menarik lebih banyak dukungan dan meningkatkan kepercayaan diri pemilih untuk memberikan suara mereka. Sebaliknya, jika sebuah kandidat tertinggal dalam polling, hal ini bisa membuat pendukungnya merasa ragu untuk memberikan suara. (Putri, 2020).

Media sosial memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik menjelang pemilu. Dengan akses mudah ke informasi dan kemampuan untuk berbagi pandangan secara luas, media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan isu-isu politik.

Namun, media sosial juga dapat menyebabkan polarisasi opini di kalangan masyarakat. Ketika individu terjebak dalam "echo chambers" atau ruang gema di mana mereka hanya terpapar

pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka, hal ini dapat memperkuat sikap ekstrem dan mengurangi dialog konstruktif. Polarisasi ini sering kali terlihat dalam kampanye pemilu di mana pendukung kandidat tertentu menjadi lebih aktif dan vokal.

Dalam sistem demokrasi, opini publik berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah dan para pemimpin politik. Ketika masyarakat tidak puas dengan kebijakan atau tindakan pemerintah, mereka dapat menyuarakan pendapat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk demonstrasi atau kampanye online. (Mukhroman, dkk, 2024).

Pemerintah yang responsif terhadap opini publik cenderung lebih akuntabel dan transparan. Jika pemerintah mengabaikan suara rakyat, mereka berisiko kehilangan dukungan dalam pemilu mendatang. Oleh karena itu, memahami opini publik menjadi sangat penting bagi para politisi dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara pemilu dan opini publik tidak hanya berdampak pada hasil pemilu itu sendiri tetapi juga pada stabilitas politik jangka panjang. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, kepercayaan terhadap sistem politik akan meningkat.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik melalui pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Ketika lebih banyak orang berpartisipasi dalam pemilu dan menyuarakan pendapat mereka, hasilnya adalah pemerintahan yang lebih representatif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Pengaruh Poling terhadap Opini Publik dan Keputusan Politik

Polling atau jajak pendapat adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan, sikap, dan preferensi masyarakat terhadap isu-isu tertentu, termasuk politik. Dalam konteks pemilu, polling berfungsi untuk mengukur elektabilitas kandidat, memahami isu yang penting bagi pemilih, dan memprediksi hasil pemilu. Pengaruh polling terhadap opini publik dan keputusan politik sangat signifikan dan dapat dilihat dari berbagai aspek.

Polling adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada sekelompok orang untuk mendapatkan gambaran tentang opini publik. Fungsi utama polling dalam konteks politik meliputi:

a. Mengukur Dukungan

Polling digunakan untuk mengetahui tingkat dukungan terhadap kandidat atau partai politik tertentu.

b. Identifikasi Isu

Polling membantu mengidentifikasi isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat, sehingga kandidat dapat menyesuaikan kampanye mereka.

c. Prediksi Hasil Pemilu

Hasil polling sering kali digunakan untuk memprediksi hasil pemilu, meskipun tidak selalu akurat. (Mukhroman, dkk, 2024).

Polling memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk opini publik. Beberapa cara di mana polling dapat mempengaruhi opini publik meliputi:

a. Efek Informasi

Polling memberikan informasi kepada masyarakat tentang posisi kandidat dan isu-isu yang sedang dibahas. Ketika hasil polling menunjukkan bahwa seorang kandidat memiliki dukungan tinggi, hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kandidat tersebut. Masyarakat cenderung mengikuti arus dan memilih kandidat yang dianggap "menang" berdasarkan hasil polling.

b. Efek Bandwagon

Fenomena ini terjadi ketika pemilih cenderung memilih kandidat yang diprediksi akan menang berdasarkan hasil polling. Ketika seseorang melihat bahwa banyak orang lain mendukung kandidat tertentu, mereka mungkin merasa terdorong untuk ikut serta dalam dukungan tersebut. Ini sering kali terjadi menjelang hari pemungutan suara ketika hasil polling terakhir dirilis.

c. Efek Underdog

Sebaliknya, ada juga efek di mana pemilih merasa simpati terhadap kandidat yang tertinggal dalam polling. Hal ini dapat mendorong mereka untuk memberikan dukungan lebih kepada kandidat tersebut sebagai bentuk protes terhadap hasil polling yang dianggap tidak adil atau tidak mencerminkan kenyataan. (Mukhroman, dkk, 2024).

Polling tidak hanya mempengaruhi opini publik tetapi juga keputusan politik dari para kandidat dan partai politik. (Zakiyah, 2024) Mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aspek pengaruh tersebut antara lain:

a. Strategi Kampanye

Hasil polling sering kali digunakan oleh tim kampanye untuk merumuskan strategi mereka. Jika sebuah kandidat mengetahui bahwa isu tertentu sangat penting bagi pemilih, mereka akan lebih fokus pada isu tersebut dalam kampanye mereka. Sebaliknya, jika polling menunjukkan bahwa seorang kandidat tidak populer di kalangan pemilih tertentu, mereka mungkin akan mengubah pendekatan mereka untuk menarik dukungan.

b. Penyesuaian Kebijakan

Politisi sering kali menggunakan hasil polling untuk menyesuaikan kebijakan mereka agar lebih sesuai dengan keinginan publik. Jika hasil polling menunjukkan bahwa masyarakat mendukung kebijakan tertentu, politisi cenderung akan memperjuangkan kebijakan tersebut di parlemen atau dalam diskusi publik.

c. Dampak pada Legitimasi

Hasil polling dapat mempengaruhi legitimasi seorang pemimpin atau partai politik. Jika sebuah partai atau kandidat terus-menerus menunjukkan dukungan rendah dalam polling, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mereka dan menyebabkan penurunan dukungan di pemilu mendatang.

Salah satu contoh nyata dari pengaruh polling terhadap opini publik dan keputusan politik dapat dilihat dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Dalam pilkada ini, beberapa lembaga survei melakukan polling secara berkala untuk mengukur elektabilitas para calon gubernur.

a. Hasil Polling dan Respons Masyarakat

Hasil-hasil polling menunjukkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan dengan calon lainnya seperti Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Hasil ini mempengaruhi opini publik yang cenderung lebih mendukung Ahok sebagai calon gubernur. Namun, situasi berubah ketika muncul isu penistaan agama yang melibatkan Ahok. Masyarakat yang sebelumnya mendukungnya mulai mempertimbangkan kembali pilihan mereka berdasarkan informasi baru yang muncul dari media dan hasil polling terbaru.

b. Dampak pada Keputusan Pemilih

Polling juga menunjukkan bahwa Anies Baswedan mulai mendapatkan dukungan setelah isu penistaan agama tersebut berkembang. Banyak pemilih yang sebelumnya ragu mulai beralih memilih Anies karena merasa lebih sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Hasil akhir dari pilkada menunjukkan bahwa Anies Baswedan berhasil memenangkan pemilihan meskipun sebelumnya berada di posisi bawah dalam beberapa hasil polling awal.

Pengaruh Opini Publik terhadap Legitimasi Politik Suatu Pemerintahan

Opini publik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai cerminan dari pandangan, sikap, dan harapan masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam konteks legitimasi politik, opini publik memiliki peran yang sangat penting. Legitimasi politik mengacu pada penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap kekuasaan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. (Nuraliza, dkk, 2024).

Opini publik adalah sekumpulan pandangan atau sikap yang dianut oleh sekelompok orang mengenai isu-isu tertentu, termasuk politik. Opini publik terbentuk melalui interaksi sosial, media, dan komunikasi politik. Dalam konteks demokrasi, opini publik berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang dapat mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan pemerintah. (Hupmas, 2011).

Legitimasi politik adalah kondisi di mana suatu pemerintahan dianggap sah dan diterima oleh masyarakat. Legitimasi ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, kepatuhan terhadap hukum, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Tanpa legitimasi, sebuah pemerintahan akan kesulitan untuk menjalankan kebijakan dan dapat menghadapi tantangan serius dari masyarakat. (Nuraliza, dkk, 2024).

Opini publik dan legitimasi politik saling terkait erat. Berikut adalah beberapa cara di mana opini publik memengaruhi legitimasi politik:

a. Sumber Legitimasi

Legitimasi suatu pemerintahan sering kali bergantung pada seberapa besar dukungan yang diterima dari masyarakat. Dalam sistem demokratis, pemilu merupakan mekanisme utama di mana opini publik terwujud secara formal. Ketika masyarakat memberikan suara mereka dalam pemilu, mereka memberikan mandat kepada para pemimpin untuk menjalankan pemerintahan. Jika hasil pemilu menunjukkan dukungan yang kuat untuk seorang kandidat atau partai politik, maka legitimasi politik mereka akan meningkat. Sebaliknya, jika sebuah pemerintahan tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat, legitimasi mereka dapat dipertanyakan. Misalnya, dalam situasi di mana pemilu dianggap tidak adil atau penuh kecurangan, masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah tidak memiliki legitimasi untuk memerintah.

b. Kontrol Sosial

Opini publik berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengawasi tindakan pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan atau tindakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka dapat menyuarakan ketidakpuasan melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa atau media sosial. Kritik publik yang luas dapat menekan pemerintah untuk mengubah atau membatalkan kebijakan yang tidak populer. Sebagai contoh, gerakan sosial yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah sering kali dipicu oleh opini publik yang menolak tindakan tertentu. Ketika pemerintah merespons dengan positif terhadap kritik tersebut, legitimasi mereka akan terjaga. Namun, jika pemerintah mengabaikan suara rakyat atau bertindak represif terhadap kritik, legitimasi mereka bisa terganggu.

c. Pembentukan Identitas Kolektif

Opini publik juga berperan dalam pembentukan identitas kolektif masyarakat. Ketika masyarakat bersatu dalam pandangan atau tujuan tertentu, hal ini dapat memperkuat legitimasi pemerintahan jika mereka mampu mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan mereka. Misalnya, jika masyarakat memiliki kesepakatan kuat tentang pentingnya hak asasi manusia dan pemerintahan mengadopsi kebijakan yang mendukung nilai-nilai tersebut, legitimasi pemerintahan akan semakin kuat. Namun, jika ada ketidakcocokan antara nilai-nilai kolektif masyarakat dengan kebijakan pemerintah, hal ini dapat menyebabkan krisis legitimasi. Masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah tidak mewakili kepentingan mereka dan mulai menuntut perubahan. (Nuraliza, dkk, 2024).

Salah satu contoh signifikan dari pengaruh opini publik terhadap legitimasi politik dapat dilihat dalam Gerakan Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pada saat itu, Presiden Soeharto telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun namun menghadapi tekanan besar dari masyarakat akibat krisis ekonomi dan korupsi yang meluas. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto semakin meningkat seiring dengan krisis ekonomi yang parah pada tahun 1997-1998. Media massa mulai melaporkan secara luas tentang ketidakpuasan rakyat dan berbagai protes yang terjadi di berbagai daerah. Opini publik mulai terbentuk dengan kuat menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Soeharto. Awalnya, pemerintah merespons dengan cara represif terhadap demonstrasi dan kritik dari masyarakat. Namun seiring waktu, tekanan dari opini publik semakin besar dan demonstrasi semakin meluas hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998 ketika ribuan orang turun ke jalan menuntut pengunduran diri Soeharto. Pada akhirnya, Soeharto terpaksa mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 setelah kehilangan dukungan dari elite politik dan militer akibat tekanan opini publik yang kuat. Krisis

legitimasi ini menunjukkan betapa pentingnya opini publik dalam menentukan arah suatu pemerintahan. (Zalzillah dan Gumelar, 2024).

Pengaruh opini publik terhadap legitimasi politik tidak hanya terjadi dalam konteks krisis tetapi juga memiliki dampak jangka panjang:

- a. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah
Ketika masyarakat aktif menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai saluran komunikasi, hal ini mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel terhadap tindakan mereka. Pemerintah yang responsif terhadap opini publik cenderung lebih dihormati oleh rakyatnya karena dianggap memperhatikan kepentingan masyarakat. (Setiawaty, 2013).
- b. Memperkuat Demokratisasi
Opini publik yang sehat dapat memperkuat proses demokratisasi dengan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini meningkatkan rasa memiliki terhadap sistem politik.
- c. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik
Pemerintah yang mendengarkan opini publik cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kualitas kebijakan publik akan meningkat karena didasarkan pada aspirasi rakyat.

KESIMPULAN

Pemilu dan opini publik memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi dalam konteks demokrasi. Pemilu memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui pemungutan suara, sedangkan opini publik mencerminkan sikap dan harapan masyarakat terhadap isu-isu politik. Polling berperan penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi keputusan politik, baik di tingkat individu maupun kolektif. Selain itu, opini publik berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang dapat memengaruhi legitimasi politik suatu pemerintahan. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar, legitimasi pemerintah akan meningkat. Namun, jika pemerintah mengabaikan opini publik, legitimasi mereka dapat terganggu, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik. Secara keseluruhan, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik melalui pemilu dan penyampaian opini publik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayan, M. (2024). Analisis Opini Massa Sikap Elit Partai Politik dan Kelompok Kepentingan Terhadap Perumusan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Generasi Ceria Indonesia*, 2(2), 176-181.
- Faizaliskandiar, M. (1994). *Polling dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Republika
- Hupmas, S. J. (2011). *Pemilu Untuk Pemula*. Jakarta: KPU RI.
- Larassetya, T. D., Suryasuciramdhan, A., Salsa, N. U., & Aeni, I. S. (2024). Analisis Opini Publik Terhadap Pemilu 2024 Pada Media Sosial X. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 292-301.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mukhroman, I., Ahmad, I., & Gumelar, R. G. (2024). Pembentukan Opini Publik pada Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus Opini Publik-Survey Elektabilitas Capres-Cawapres 2024 Pasca Debat Pertama). *Syntax Idea*, 6(6), 2471-2482.
- Nuraliza, V., Rahmadi, A. N., Mubaroq, A., Kristiyono, K., Melani, A. P., & Ifana, A. (2024). Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi Pemilu 2024. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(1), 245-261.
- Putri, D. T. E. (2020). Pengaruh Hasil Polling Terhadap Pembentukan Opini Pemilih Pemula. *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 96(2), 96-128.
- Samuel P. Huntington, J. N. (1990). *Partisipasi Poliitk di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Setiawaty, D. (2013). *Pemilih Pemuda, Sudah Cerdas?* Jakarta: Perludem

- Suhaeri, & Krisna, A. (2023). Polarisasi Opini Di Media Sosial Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Indonesia. *Jurnal Kebangsaan RI*, 1(1), 1-9.
- Zakiyah, Z., Agnia, R., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. S. M. (2024). Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2). 10-17.
- Zalzillah, L. N., & Gumelar, R. G. (2024). Kontribusi Media Digital dalam Membangun Opini Publik Pemilu 2024 (Studi Kasus Narasi Newsroom). *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 49-60.